

BAB I

PENDAHULUAN

Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada pemerintah daerah, Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 07 Tahun 2021 tentang Pengelolaan keuangan Daerah, Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 73 Tahun 2014 tentang kebijakan akuntansi Pemerintah Prov. Sulawesi Selatan dan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 74 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah bahwa Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus menyusun laporan yang terdiri atas :

- A. Laporan Realisasi Anggaran;
- B. Neraca;
- C. Neraca Saldo
- D. Laporan Operasional;
- E. Laporan Perubahan Ekuitas dan
- F. Catatan atas Laporan keuangan.

A. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan realisasi anggaran menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan dari suatu entitas akuntansi dan entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya, informasi tersebut berguna bagi pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran dengan:

- a. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi.
- b. Menyediakan informasi mengenai realisasi anggaran secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran.

B. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Unsur yang di cakup oleh neraca terdiri dari aset, kewajiban dan ekuitas dana masing-masing unsur didefinisikan sebagai berikut:

- a. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa dimasa lalu dan manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh baik oleh pemerintah maupun masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk menyediakan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

- b. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- c. Ekuitas dana adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.

C. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan operasional menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas akuntansi dan entitas yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit dari suatu entitas akuntansi dan entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

Laporan operasional menyediakan informasi mengenai:

- a. Besarnya beban yang harus ditanggung oleh entitas akuntansi.
- b. Operasi keuangan secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja entitas akuntansi dan entitas pelaporan dalam hal efisiensi, efektivitas, dan kehematan perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi.
- c. Prediksi pendapatan-LO yang akan diterima untuk mendanai kegiatan entitas akuntansi dan entitas pelaporan pemerintah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif.
- d. Penurunan ekuitas (bila defisit operasional) dan peningkatan ekuitas (bila surplus operasional).

Laporan operasional disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus sehingga penyusunan laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, dan neraca mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggung jawabkan.

D. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan perubahan ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos :

- a. Ekuitas awal Surplus / defisit-LO pada periode bersangkutan
- b. Koreksi-koreksi yang langsung menambah / mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar misalnya:
 - 1. Koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya.
 - 2. Perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.

Disamping itu suatu entitas akuntansi dan entitas pelaporan menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam laporan Perubahan Ekuitas dalam catatan atas laporan keuangan.

E. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Setiap entitas akuntansi dan entitas pelaporan menyajikan Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan untuk tujuan umum.

Catatan atas laporan keuangan mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Informasi umum tentang entitas pelaporan dan entitas akuntansi;
- b. Informasi tentang kebijakan fiscal / keuangan dan ekonomi makro;

- c. Ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
- d. Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian penting lainnya.
- e. Rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan.
- f. Informasi yang diharuskan oleh kebijakan akuntansi yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan;
- g. Informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan;

Catatan atas laporan keuangan disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam Laporan realisasi anggaran, Neraca, Laporan operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas.

1.1. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan adalah untuk memberikan dan menyajikan laporan pertanggung jawaban sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, dan kinerja keuangan suatu entitas akuntansi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas pemerintah kepada masyarakat.

1.2. LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Penyusunan Laporan Keuangan SKPD disusun dengan mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain:

- a. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- c. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- d. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
- e. Undang-undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan daerah;
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan daerah;
- i. Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- j. Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual pada pemerintah daerah ;

- k. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 03 tahun 2015 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
- l. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 73 tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
- m. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 74 tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah,;

1.3. SISTEMATIKA PENULISAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Sistematika penulisan ini dibagi dalam 5 (lima) bab dengan rincian pembahasan sebagai berikut :

- BAB I : Berisi pendahuluan yang membahas secara umum maksud dan tujuan penyusunan Laporan keuangan, Landasan hukum penyusunan laporan keuangan, Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan.
- BAB II : Berisi Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan yang membahas secara umum tentang indikator target kinerja keuangan yang terdiri dari indikator makro pembangunan dan indikator bidang-bidang pembangunan serta indikator keberhasilan pembangunan.
- BAB III : Berisi penjelasan pos-pos laporan keuangan yang membahas secara rinci tentang rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan yang terdiri dari Pendapatan, Belanja, Aset, Kewajiban, Ekuitas Dana, dan serta Pengungkapan atas pos-pos Asset dan kewajiban lain-lain.
- BAB IV : Penjelasan atas informasi-informasi non keuangan OPD
- BAB V : Penutup.

BAB II

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROV. SULSEL

2.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Sulsel

I. Pendapatan

Berkenaan dengan kebijakan keuangan yang diatur dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Sulsel merupakan salah satu organisasi perangkat daerah yang dibentuk ulang berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 50 Tahun 2019 yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 96 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan.

Dari segi pendapatan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Sulsel ditargetkan dalam pendapatan asli daerah berupa retribusi pemakaian kekayaan daerah dengan nilai target pendapatan sebesar Rp.12.840.000,- di tahun 2023.

II. Belanja

Dari segi belanja, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Sulsel untuk Tahun Anggaran 2023 melaksanakan Kegiatan Belanja Daerah dan Pembiayaan. Dari segi neraca, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Sulsel sebagai pengguna aset dan melakukan pencatatan atas aset tetap serta melakukan pengadaan sesuai kebutuhan pada setiap kegiatan belanja daerah yang secara administrasi perhitungan neraca terpusat pada Badan Keuangan dan Aset Daerah.

Adapun posisi keuangan periode Tahun Anggaran 2023, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Sulsel mendapat alokasi belanja daerah sebesar Rp.10.381.108.310,00 yang terdiri dari anggaran belanja operasi sebesar Rp.10.076.142.310,00 dan terbagi menjadi belanja pegawai sebesar Rp.7.793.024.500,00 serta belanja barang dan jasa sebesar Rp.2.283.117.810,00 dan anggaran belanja modal sebesar Rp.304.966.000,00 yang anggarannya bersumber dari APBD Prov. Sulsel dengan realisasi anggaran belanja daerah sampai 31 Desember 2023 mencapai Rp.10.008.309.296,00 atau 96,41% dengan sisa anggaran sebesar Rp.372.799.014.00, pada belanja tersebut dapat dijabarkan belanja daerah

yang terdiri dari belanja operasi dan belanja modal yang memiliki 5 (lima) program, 16 (enam belas) kegiatan dan 42 (empat puluh dua) sub kegiatan sebagai berikut :

NO	URAIAN	TARGET		HASIL		%	
		KELUARAN	KEUANGAN	KELUARAN	KEUANGAN	KINERJA	KEUANGAN
A.	PENDAPATAN DAERAH	100.00	12,840,000.00	100.00	21,166,884.19	100.00	164.85
1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	100.00	12,840,000.00	100.00	21,166,884.19	100.00	164.85
1.1	Retribusi Daerah	100.00	12,840,000.00	100.00	12,840,000.00	100.00	100.00
1.1.1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	100.00	12,840,000.00	100.00	12,840,000.00	100.00	100.00
1.2	Lain-lain PAD Yang Sah	100.00	0.00	100.00	8,326,884.19	100.00	0.00
1.2.1	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Bendahara	0.00	0.00	100.00	4,221,884.19	100.00	0.00
1.2.2	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	0.00	0.00	100.00	4,105,000.00	100.00	0.00
B.	BELANJA DAERAH	100.00	10,381,108,310.00	100.00	10,008,309,296.00	100.00	96.41
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100.00	9,701,099,410.00	100.00	9,340,694,676.00	100.00	96.28
1.1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100.00	245,290,800.00	100.00	241,647,768.00	100.00	98.51
	Masukan	Dana yang terealisasikan Rp.241.647.768,00					
	Keluaran	Persentasi keterpenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja tepat waktu 100%					
	Hasil	Cakupan dokumen yang telah tersusun terkait perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja tepat waktu 100%					
	Sumber Pendanaan	Pendapatan Asli Daerah (PAD)					
	Lokasi	Kota Makassar					
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	124,897,800.00	3 Dokumen	121,467,400.00	100.00	97.25
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	5,332,000.00	1 Dokumen	5,285,500.00	100.00	99.13
1.1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	7,534,000.00	1 Dokumen	7,500,000.00	100.00	99.55
1.1.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1 Dokumen	5,000,000.00	1 Dokumen	4,997,900.00	100.00	99.96
1.1.5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	6,587,700.00	1 Dokumen	6,580,500.00	100.00	99.89
1.1.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	4,475,300.00	2 Laporan	4,363,800.00	100.00	97.51
1.1.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	91,464,000.00	5 Laporan	91,452,668.00	100.00	99.99
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100.00	7,862,487,500.00	100.00	7,603,075,061.00	100.00	96.70
	Masukan	Dana yang terealisasikan Rp.7.603.075.061,00					
	Keluaran	Persentasi keterpenuhan laporan administrasi Keuangan tepat waktu 100%					
	Hasil	Cakupan laporan yang telah dibuat terkait administrasi keuangan tepat waktu 100%					
	Sumber Pendanaan	Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU)					
	Lokasi	Kota Makassar					
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	65 Orang	7,793,024,500.00	65 Orang	7,536,097,607.00	100.00	96.70
1.2.2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	5,000,000.00	12 Dokumen	4,933,500.00	100.00	98.67
1.2.3	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	6 Dokumen	15,000,000.00	6 Dokumen	14,858,000.00	100.00	99.05
1.2.4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	18 Laporan	44,463,000.00	18 Laporan	42,185,954.00	100.00	94.88
1.2.5	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	5,000,000.00	1 Dokumen	5,000,000.00	100.00	100.00

1.3	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	100.00	18,936,750.00	100.00	18,909,350.00	100.00	99.86
	Masukan	Dana yang terealisasikan Rp.18,909,350.00					
	Keluaran	Persentasi keterpenuhan laporan administrasi barang milik daerah 100%					
	Hasil	Cakupan laporan yang telah dibuat terkait administrasi barang milik daerah 100%					
	Sumber Pendanaan	Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Bagi Hasil (DBH)					
	Lokasi	Kota Makassar					
1.3.1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	14,999,250.00	2 Dokumen	14,999,250.00	100.00	100.00
1.3.2	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	3,937,500.00	1 Laporan	3,910,100.00	100.00	99.30
1.4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100.00	41,580,000.00	100.00	41,580,000.00	100.00	100.00
	Masukan	Dana yang terealisasikan Rp.41.580.000,00					
	Keluaran	Persentasi keterpenuhan pegawai 100%					
	Hasil	Cakupan kebutuhan pegawai yang telah terpenuhi 100%					
	Sumber Pendanaan	Pendapatan Asli Daerah (PAD)					
	Lokasi	Kota Makassar					
1.4.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	1 Paket	41,580,000.00	1 Paket	41,580,000.00	100.00	100.00
1.5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100.00	360,648,900.00	100.00	331,921,124.00	100.00	92.03
	Masukan	Dana yang terealisasikan Rp.331.921.124,00					
	Keluaran	Persentasi keterpenuhan kebutuhan administrasi umum 100%					
	Hasil	Cakupan kebutuhan administrasi umum yang telah terpenuhi 100%					
	Sumber Pendanaan	Pendapatan Asli Daerah (PAD)					
	Lokasi	Kota Makassar					
1.5.1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10 Paket	99,966,000.00	10 Paket	78,650,000.00	100.00	78.68
Volume sudah terpenuhi tetapi Harga Perkiraan Sendiri (HPS) lebih tinggi dari pada harga pasar							
1.5.2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10 Paket	11,729,000.00	10 Paket	11,637,000.00	100.00	99.22
1.5.3	Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaan	3 Paket	3,900,000.00	3 Paket	3,900,000.00	100.00	100.00
1.5.4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1 Dokumen	2,400,000.00	1 Dokumen	2,400,000.00	100.00	100.00
1.5.5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	41,760,000.00	1 Laporan	41,752,500.00	100.00	99.98
1.5.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 Laporan	197,944,000.00	24 Laporan	190,631,724.00	100.00	96.31
1.5.7	Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	1 Dokumen	2,949,900.00	1 Dokumen	2,949,900.00	100.00	100.00
1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100.00	742,277,460.00	100.00	732,270,330.00	100.00	98.65
	Masukan	Dana yang terealisasikan Rp.732.270.330,00					
	Keluaran	Persentasi pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah 100%					
	Hasil	Cakupan pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang telah terpenuhi 100%					
	Sumber Pendanaan	Pendapatan Asli Daerah (PAD)					
	Lokasi	Kota Makassar					
1.6.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 Laporan	120,000,000.00	1 Laporan	118,790,000.00	100.00	98.99
1.6.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 Laporan	622,277,460.00	1 Laporan	613,480,330.00	100.00	98.59
1.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100.00	429,878,000.00	100.00	371,291,043.00	100.00	86.37
	Masukan	Dana yang terealisasikan Rp.371.291.043,00					
	Keluaran	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah 35 unit					
	Hasil	Cakupan barang milik daerah yang telah terpenuhi 100%					
	Sumber Pendanaan	Pendapatan Asli Daerah (PAD)					
	Lokasi	Kota Makassar					

1.7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	9 Unit	207,950,000.00	9 Unit	151,263,150.00	100.00	72.74
Volume pajak sudah terpenuhi tetapi Harga Perkiraan Sendiri (HPS) lebih tinggi dari pada harga pajak yang sebenarnya							
1.7.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	1 Unit	9,828,000.00	1 Unit	9,819,200.00	100.00	99.91
1.7.3	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	23 Unit	12,100,000.00	23 Unit	12,100,000.00	100.00	100.00
1.7.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2 Unit	200,000,000.00	2 Unit	198,108,693.00	100.00	99.05
2.	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	100.00	161,182,400.00	100.00	160,511,156.00	100.00	99.58
2.1	Pelayanan Pendaftaran Kependudukan	100.00	90,492,600.00	100.00	89,964,200.00	100.00	99.42
	Masukan	Dana yang terealisasikan Rp.89.964.200,00					
	Keluaran	Persentase Kab/Kota yang mendapatkan pelayanan pendaftaran penduduk 100%					
	Hasil	Cakupan kab/kota yang telah mendapatkan pelayanan pendaftaran penduduk 100%					
	Sumber Pendanaan	Pendapatan Asli Daerah (PAD)					
	Lokasi	Kota Makassar					
2.1.1	Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk Skala Provinsi	1 Dokumen	56,482,600.00	1 Dokumen	56,018,300.00	100.00	99.18
2.1.2	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk	1 Dokumen	34,010,000.00	1 Dokumen	33,945,900.00	100.00	99.81
2.2	Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	100.00	68,563,200.00	100.00	68,460,056.00	100.00	99.85
	Masukan	Dana yang terealisasikan Rp.68.460.056,00					
	Keluaran	Persentase Kab/Kota yang difasilitasi dalam penyelenggaraan pendaftaran penduduk 100%					
	Hasil	Cakupan kab/kota yang telah difasilitasi dalam penyelenggaraan pendaftaran penduduk 100%					
	Sumber Pendanaan	Pendapatan Asli Daerah (PAD)					
	Lokasi	Kota Makassar					
2.2.1	Fasilitasi Terkait Pendaftaran Penduduk	1 Laporan	68,563,200.00	1 Laporan	68,460,056.00	100.00	99.85
2.3	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	100.00	2,126,600.00	100.00	2,086,900.00	100.00	98.13
	Masukan	Dana yang terealisasikan Rp.2.086.900,00					
	Keluaran	Persentase Kab/Kota yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pendaftaran penduduk 100%					
	Hasil	Cakupan kab/kota yang telah mendapatkan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pendaftaran penduduk 100%					
	Sumber Pendanaan	Pendapatan Asli Daerah (PAD)					
	Lokasi	Kota Makassar					
2.3.1	Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk	1 Laporan	2,126,600.00	1 Laporan	2,086,900.00	100.00	98.13
3.	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	100.00	275,021,300.00	100.00	267,634,544.00	100.00	97.31
3.1	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi	100.00	216,245,900.00	100.00	209,844,444.00	100.00	97.04
	Masukan	Dana yang terealisasikan Rp.209.844.444,00					
	Keluaran	Persentase Kab/Kota yang difasilitasi dalam penyelenggaraan pencatatan sipil 100%					
	Hasil	Cakupan Kab/Kota yang telah difasilitasi dalam penyelenggaraan pencatatan sipil 100%					
	Sumber Pendanaan	Pendapatan Asli Daerah (PAD)					
	Lokasi	Kota Makassar					
3.1.1	Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil	1 Laporan	43,172,800.00	1 Laporan	43,102,200.00	100.00	99.84
3.1.2	Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil	1 Laporan	121,142,700.00	1 Laporan	115,004,700.00	100.00	94.93

3.1.3	Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	1 Laporan	51,930,400.00	1 Laporan	51,737,544.00	100.00	99.63
3.2	Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	100.00	58,775,400.00	100.00	57,790,100.00	100.00	98.32
	Masukan	Dana yang terealisasikan Rp.57.790.100,00					
	Keluaran	Persentasi kab/kota yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pencatatan sipil 100%					
	Hasil	Cakupan kab/kota yang telah mendapatkan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pencatatan sipil 100%					
	Sumber Pendanaan	Pendapatan Asli Daerah (PAD)					
	Lokasi	Kota Makassar					
3.2.1	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pencatatan Sipil	1 Laporan	58,775,400.00	1 Laporan	57,790,100.00	100.00	98.32
4.	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	100.00	150,059,800.00	100.00	145,849,620.00	100.00	97.19
4.1	Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	100.00	34,446,200.00	100.00	34,281,200.00	100.00	99.52
	Masukan	Dana yang terealisasikan Rp.34.281.200,00					
	Keluaran	Persentase pengelolaan data kependudukan skala provinsi 100%					
	Hasil	Cakupan pengelolaan data kependudukan skala provinsi 100%					
	Sumber Pendanaan	Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Bagi Hasil (DBH)					
	Lokasi	Kota Makassar					
4.1.1	Penyusunan Tata Cara Pengelolaan Data Kependudukan yang Bersifat Data Perseorangan, Data Agregat dan Data Pribadi di Provinsi dan Kabupaten/kota	1 Dokumen	34,446,200.00	1 Dokumen	34,281,200.00	100.00	99.52
4.2	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	100.00	44,244,000.00	100.00	40,758,200.00	100.00	92.12
	Masukan	Dana yang terealisasikan Rp.40.758.200,00					
	Keluaran	Persentase Kab/Kota/OPD/Lembaga yang difasilitasi dalam penyelenggaraan pengelolaan informasi administrasi kependudukan 100%					
	Hasil	Cakupan Kab/Kota/OPD/Lembaga yang telah difasilitasi dalam penyelenggaraan pengelolaan informasi administrasi kependudukan 100%					
	Sumber Pendanaan	Pendapatan Asli Daerah (PAD)					
	Lokasi	Kota Makassar					
4.2.1	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1 Laporan	1,991,000.00	1 Laporan	1,880,000.00	100.00	94.42
4.2.2	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	1 Dokumen	42,253,000.00	1 Dokumen	38,878,200.00	100.00	92.01
4.3	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	100.00	71,369,600.00	100.00	70,810,220.00	100.00	99.22
	Masukan	Dana yang terealisasikan Rp.70.810.220,00					
	Keluaran	Persentase Kab/Kota yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan informasi administrasi kependudukan 100%					
	Hasil	Cakupan Kab/Kota yang telah mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan informasi administrasi kependudukan 100%					
	Sumber Pendanaan	Pendapatan Asli Daerah (PAD)					
	Lokasi	Kota Makassar					
4.3.1	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1 Laporan	66,937,600.00	1 Laporan	66,379,220.00	100.00	99.17
4.3.2	Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	60 Orang	4,432,000.00	60 Orang	4,431,000.00	100.00	99.98
5.	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	100.00	93,745,400.00	100.00	93,619,300.00	100.00	99.87
5.1	Penyediaan Profil Kependudukan	100.00	93,745,400.00	100.00	93,619,300.00	100.00	99.87

Masukan	Dana yang terealisasikan Rp.93.619.300,00						
Keluaran	Persentasi ketersediaan profil dan data kependudukan skala provinsi 100%						
Hasil	Cakupan ketersediaan profil dan data kependudukan skala provinsi 100%						
Sumber Pendanaan	Pendapatan Asli Daerah (PAD)						
Lokasi	Kota Makassar						
5.1.1	Penyediaan Data Kependudukan Provinsi	1 Dokumen	93,745,400.00	1 Dokumen	93,619,300.00	100.00	99.87

2.2. Hambatan Dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan

Pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Sulsel sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang mengurus urusan administrasi kependudukan dan catatan sipil secara umum dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai kewenangannya, namun demikian terdapat hambatan dan kendala dalam hal hampir setiap kegiatan ada beberapa yang nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pada pagu kegiatan lebih tinggi dari harga pasar yang sesuai kenyataannya dan menyebabkan terdapatnya sisa anggaran yang berlebih, serta penyiapan sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan agar dapat berakselerasi dengan cepat sejalan dengan dinamika perkembangan penduduk dan paradigma masyarakat.

BAB III

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROV. SULSEL

3.1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

3.1.1. Pendapatan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Sulsel, pada pendapatan asli daerah (PAD) mengelola retribusi pemakaian kekayaan daerah yang ditargetkan selama 12 bulan pada TA. 2023 dengan nilai pendapatan sebesar Rp.12.840.000,00 yang sama pada TA. 2022, serta pendapatan lain-lain PAD yang sah dengan nilai realisasi sebesar Rp.8.326.884,19 dapat dilihat pada table di bawah ini :

No.	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	6	7
	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Rp.12.840.000,00	Rp.21.166.884,19	164,85	Rp.12.840.000,00
I	Retribusi Daerah	Rp.12.840.000,00	Rp.12.840.000,00	100,00	Rp.12.840.000,00
1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	Rp.12.840.000,00	Rp.12.840.000,00	100,00	Rp.12.840.000,00
II	Lain-lain PAD yang Sah	Rp.0,00	Rp.8.326.884,19	0,00	Rp.0,00
1	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara	Rp.0,00	Rp.4.221.884,19	0,00	Rp.0,00
2	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	Rp.0,00	Rp.4.105.000,00	0,00	Rp.0,00
	Jumlah Pendapatan	Rp.12.840.000,00	Rp.21.166.884,19	164,85	Rp.12.840.000,00

Ket :

- Lain-lain PAD yang Sah :

1. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara yang terdiri dari :

- Pengembalian temuan Inspektorat Provinsi atas kelebihan Pembayaran BBM TA. 2022 00011/STS-DKCAPIL/V/2023-2.12.0.00.0.00.20.0000 sebesar Rp.1.268.000,00
- Pengembalian temuan Inspektorat Provinsi atas kelebihan bayar kegiatan belanja modal bangunan gedung kantor (rehab gedung kantor) 00012/STS-DKCAPIL/V/2023-2.12.0.00.0.00.20.0000 sebesar Rp.2.074.599,35
- Pengembalian temuan Inspektorat Provinsi atas kelebihan bayar kegiatan pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-rumah negara golongan II 00013/STS-DKCAPIL/V/2023-2.12.0.00.0.00.20.0000 sebesar Rp.879.284,84

2. Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas yang terdiri dari :

- Pengembalian temuan Inspektorat Provinsi atas biaya perjalanan dinas dalam daerah kab.Wajo an.Dra.Sukarniaty Kondolele TA. 2022 00014/STS-DKCAPIL/V/2023-2.12.0.00.0.00.20.0000 Sebesar Rp.715.000,00
- Pengembalian temuan Inspektorat Provinsi atas biaya perjalanan dinas dalam daerah di kab.Pinrang,Sidrap,Enrekang an.Adi Sunni TA. 2022 00015/STS-DKCAPIL/V/2023-2.12.0.00.0.00.20.0000 Sebesar Rp.535.000,00
- Pengembalian temuan Inspektorat Provinsi atas biaya perjalanan dinas dalam daerah di kab.Pinrang,Sidrap,Enrekang an.Dra.Sukarniaty Kondolele TA. 2022 00016/STS-DKCAPIL/V/2023-2.12.0.00.0.00.20.0000 Sebesar Rp.715.000,00
- Pengembalian temuan Inspektorat Provinsi atas atas kelebihan pembayaran transport PP Kota Pare-Pare an.Sutrisno Adhy Putra, Andi Mugniwangsa, Abdur Rahman TA. 2023 00017/STS-DKCAPIL/V/2023-2.12.0.00.0.00.20.0000 Sebesar Rp.570.000,00
- Pengembalian temuan Inspektorat Provinsi atas biaya perjalanan dinas dalam daerah di kab.Soppeng an.Muh.Imran, SH TA. 2022 00018/STS-DKCAPIL/V/2023-2.12.0.00.0.00.20.0000 Sebesar Rp.1.210.000,00
- Pengembalian temuan Inspektorat Provinsi atas atas kelebihan pembayaran transport PP Kab.Bone an.Sutrisno Adhy Putra, Fathiyah Ramadhani TA. 2023 00019/STS-DKCAPIL/V/2023-2.12.0.00.0.00.20.0000 Sebesar Rp.570.000,00

3.1.2. Belanja

Pada Tahun Anggaran 2023, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Sulsel mendapat belanja yang dimasukkan dalam laporan realisasi anggaran adalah realisasi belanja berdasarkan SPJ belanja bulan Januari sampai dengan bulan Desember.

No.	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	6	7
1.	Belanja Daerah	Rp.10.381.108.310,00	Rp.10.009.239.296,00	96,42	Rp.12.127.012.879,89

Anggaran belanja senilai Rp.10.381.108.310,00 dan realisasi senilai Rp.10.008.309.296,00 atau 96,41% dan untuk tahun 2022 dengan realisasi Rp.12.127.012.879,89 dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	6	7
	Belanja Daerah	Rp.10.381.108.310,00	Rp10.009.239.296,00	96,42	Rp.12.127.012.879,89
1	Belanja Operasi	Rp.10.076.142.310,00	Rp.9.727.530.603,00	96,54	Rp.11.638.038.166,89
2	Belanja Modal	Rp.304.966.000,00	Rp.281.708.693,00	92,37	Rp.488.974.713,00
	Jumlah Belanja	Rp.10.381.108.310,00	Rp.10.009.239.296,00	96,42	Rp.12.127.012.879,89

3.1.2.a. Belanja Operasi

No.	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	6	7
1.	Belanja Operasi	Rp.10.076.142.310,00	Rp.9.727.530.603,00	96,54	Rp.11.638.038.166,89

Realisasi belanja operasi tahun anggaran 2023 sebesar Rp.9.727.530.603,00 atau 96,54% dari anggaran Rp.10.076.142.310,00 dan untuk tahun anggaran 2022 sebesar Rp.11.638.038.166,89 dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	6	7
	Belanja Operasi	Rp.10.076.142.310,00	Rp.9.727.530.603,00	96,54	Rp.11.638.038.166,89
1	Belanja Pegawai	Rp.7.793.024.500,00	Rp.7.536.097.607,00	96,70	Rp.7.113.664.516,00
2	Belanja Barang dan Jasa	Rp.2.283.117.810,00	Rp.2.191.432.996,00	95,98	Rp.4.524.373.650,89
	Jumlah Belanja Operasi	Rp.10.076.142.310,00	Rp.9.727.530.603,00	96,54	Rp.11.638.038.166,89

3.1.2.a.1. Belanja Pegawai

No.	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	6	7
1.	Belanja Pegawai	Rp.7.793.024.500,00	Rp.7.536.097.607,00	96,70	Rp.7.113.664.516,00

Belanja Pegawai pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Sulsel sebesar Rp.7.793.024.500,00 dapat direalisasi sebesar Rp.7.536.097.607,00 atau 96,70% dan untuk tahun anggaran 2022 sebesar Rp.7.113.664.516,00.

Rincian Belanja Pegawai T.A. 2023 yang terbagi atas belanja PNS dan PPPK dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

No.	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6
1.	Belanja Gaji Pokok PNS	Rp.2.395.039.470,00	Rp.2.319.368.724,00	96,84	Rp.2.500.468.744,00
2.	Belanja Gaji Pokok PPPK	Rp.116.690.013,00	Rp.115.652.600,00	99,11	Rp.66.087.200,00
3.	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	Rp.211.833.204,00	Rp.202.685.378,00	95,68	Rp.220.001.404,00
4.	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	Rp.11.101.092,00	Rp.11.002.852,00	99,12	Rp.6.287.344,00
5.	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	Rp.140.246.250,00	Rp.133.945.000,00	95,51	Rp.137.769.800,00
6.	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	Rp.59.720.500,00	Rp.47.934.000,00	80,26	Rp.59.269.960,00
7.	Belanja Tunjangan Fungsional umum PNS	Rp.87.770.000,00	Rp.84.270.000,00	96,01	Rp.88.760.000,00

8.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	Rp.7.698.125,00	Rp.7.630.000,00	99,12	Rp.4.360.000,00
9.	Belanja Tunjangan Beras PNS	Rp.128.617.920,00	Rp.123.693.360,00	96,17	Rp.133.759.740,00
10.	Belanja Tunjangan Beras PPPK	Rp.9.206.393,00	Rp.9.124.920,00	99,12	Rp.5.214.240,00
11.	Belanja Tunjangan pph/Tunjangan khusus PNS	Rp.11.209.837,00	Rp.10.736.618,00	95,78	Rp.11.626.489,00
12.	Belanja Pembulatan Gaji PNS	Rp.36.850,00	Rp.35.370,00	95,98	Rp.36.064,00
13.	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	Rp.3.138,00	Rp.3.108,00	99,04	Rp.1.796,00
14.	Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS	Rp.99.876.552,00	Rp.95.677.741,00	95,80	Rp.102.799.838,00
15.	Belanja luran Jaminan Kesehatan PPPK	Rp.4.652.023,00	Rp.4.604.064,00	98,97	Rp.2.685.704,00
16.	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	Rp.5.465.767,00	Rp.4.775.374,00	87,37	Rp.5.128.344,00
17.	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	Rp.240.390,00	Rp.237.912,00	98,97	Rp.138.782,00
18.	Belanja luran Jaminan Kematian PNS	Rp.15.897.435,00	Rp.14.326.214,00	90,12	Rp.15.385.196,00
19.	Belanja luran Jaminan Kematian PPPK	Rp.722.433,00	Rp.713.748,00	98,80	Rp.416.353,00
21.	Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja PNS	Rp.3.324.013.142,00	Rp.3.219.446.490,00	96,85	Rp.3.753.467.518,00
22.	Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja PNS	Rp.827.810.877,00	Rp.804.650.082,00	97,20	Rp.0,00
23.	Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja PNS	Rp.335.173.089,00	Rp.325.584.052,00	97,14	Rp.0,00
	Jumlah Belanja Pegawai	Rp.7.793.024.500,00	Rp.7.536.097.607,00	96,70	Rp.7.113.664.516,00

3.1.2.a.2. Belanja Barang dan Jasa

No.	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	6	7
1.	Belanja Barang dan Jasa	Rp.2.283.117.810,00	Rp.2.191.432.996,00	95,98	Rp.4.524.373.650,89

Belanja Barang dan Jasa pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Sulsel tahun 2023 sebesar Rp.2.283.117.810,00 dapat direalisasikan sebesar Rp.2.191.432.996,00 atau 95,98%. Dan pada tahun anggaran 2022 sebesar Rp.4.524.373.650,89.

Rincian Belanja Barang dan Jasa T.A. 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

No.	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6
1.	Belanja Barang Pakai Habis	649.187.350,00	595.236.570,00	91,69	1.850.257.497,00
	Belanja Bahan Bakar dan Pelumas	161.298.000,00	113.143.350,00	70,15	129.339.250,00
	Belanja Alat Tulis Kantor	50.975.050,00	50.320.750,00	98,72	341.362.355,00
	Belanja Kertas dan Cover	46.205.700,00	45.964.400,00	99,48	1.350.000,00
	Belanja Bahan Cetak	75.583.600,00	75.505.600,00	99,90	157.514.019,00
	Belanja Benda Pos	275.000,00	275.000,00	100,00	0,00
	Belanja Bahan Komputer	20.976.000,00	20.642.970,00	98,41	55.966.725,00
	Belanja Perabot Kantor	1.800.000,00	1.790.000,00	99,44	0,00
	Belanja Alat Listrik	2.154.000,00	2.122.000,00	98,51	0,00
	Belanja Souvenir/Cendera Mata	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	0,00
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	205.080.000,00	200.640.000,00	97,83	1.048.604.400,00
	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	41.760.000,00	41.752.500,00	99,98	74.040.748,00
	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	41.580.000,00	41.580.000,00	100,00	0,00
	Belanja Pakaian KORPRI	0,00	0,00	0,00	42.080.000,00
2.	Belanja Jasa Kantor	777.155.480,00	755.800.016,00	97,25	845.377.654,00
	Belanja Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	28.100.000,00	20.950.000,00	74,56	139.700.000,00
	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	498.600.000,00	493.600.000,00	99,00	409.600.007,00
	Belanja Jasa Tenaga Ahli	0,00	0,00	0,00	4.800.000,00
	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	81.243.480,00	81.173.016,00	99,91	69.583.372,00
	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	0,00	0,00	0,00	49.900.000,00
	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film dan Pemetretan	120.000.000,00	118.790.000,00	98,99	100.000.000,00
	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	2.400.000,00	2.400.000,00	100,00	2.400.000,00

	Belanja Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan	18.000.000,00	10.192.000,00	56,62	10.428.275,00
	Belanja Lembur	28.812.000,00	28.695.000,00	99,59	58.966.000,00
3.	Belanja luran Jaminan/Asuransi	42.433.980,00	38.707.314,00	91,22	29.279.040,00
	Belanja luran Jaminan Kesehatan Non ASN	39.193.980,00	36.212.514,00	92,39	26.892.240,00
	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja Non ASN	1.440.000,00	1.108.800,00	77,00	1.060.800,00
	Belanja luran Jaminan Kematian Non ASN	1.800.000,00	1.386.000,00	77,00	1.326.000,00
4.	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	14.500.000,00
	Belanja Sewa Audio Visual	0,00	0,00	0,00	14.500.000,00
5.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	53.355.000,00	52.622.000,00	98,63	83.676.550,00
	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	4.850.000,00	4.700.000,00	96,91	64.816.550,00
	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Penumpang	33.630.000,00	33.047.000,00	98,27	0,00
	Belanja Pemeliharaan Alat Pembersih	2.775.000,00	2.775.000,00	100,00	0,00
	Belanja Pemeliharaan Alat Pendingin	6.500.000,00	6.500.000,00	100,00	7.860.000,00
	Belanja Pemeliharaan Personal Computer	5.600.000,00	5.600.000,00	100,00	6.000.000,00
	Belanja Pemeliharaan Peralatan Komputer Lainnya	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
6.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	198.564.861,89
	Belanja Pemeliharaan Rumah Negara Golongan II	0,00	0,00	0,00	198.564.861,89
7.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	760.986.000,00	749.067.096,00	98,31	1.502.718.048,00
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	760.986.000,00	749.067.096,00	98,31	1.499.059.668,00
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	0,00	0,00	0,00	0,00
	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	0,00	0,00	0,00	3.658.380,00
	Jumlah	2.283.117.810,00	2.191.432.996,00	95,98	4.524.373.650,89

Keterangan :

- Pada penyerapan realisasi Belanja Barang Pakai Habis sudah terlaksana sesuai dengan target volume kegiatan, akan tetapi di Belanja Bahan Bakar dan Pelumas ada pembatasan dalam pemberian BBM berdasarkan hari kerja sesuai ketentuan aturan dari BPK tentang batas tertinggi pemakaian BBM yang wajar untuk pejabat.
- Pada penyerapan realisasi Belanja Jasa Kantor sudah dilaksanakan sesuai dengan target kegiatan, akan tetapi di Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia ada narasumber yang dari pelaksana kegiatan dibayarkan hanya 50% dari pagu yang tersedia serta pada kegiatan Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan pada pagu SIPD mempunyai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang tinggi dari harga pajak yang sebenarnya.
- Pada penyerapan realisasi Belanja luran Jaminan/Asuransi di Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja Non ASN dan Belanja luran Jaminan Kematian Non ASN adanya kelebihan anggaran dikarenakan selisih perhitungan dari pihak BPSJ Ketenagakerjaan dan adanya tenaga Non ASN yang keluar dan pindah ke OPD lain.

3.1.2.b. Belanja Modal

No.	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	6	7
1.	Belanja Modal	Rp.304.966.000,00	Rp.281.708.693,00	92,37	Rp.488.974.713,00

Realisasi belanja modal tahun anggaran 2023 sebesar Rp.281.708.693,00 atau 92,37% dari anggaran Rp.304.966.000,00 dan untuk tahun anggaran 2022 sebesar Rp.488.974.713,00 dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6
	Belanja Modal	Rp.304.966.000,00	Rp.281.708.693,00	92,37	Rp.488.974.713,00
1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp.104.966.000,00	Rp.83.600.000,00	79,64	Rp.309.443.050,89
2	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp.200.000.000,00	Rp.198.108.693,00	99,05	Rp.179.531.662,11
	Jumlah Belanja Modal	Rp.304.966.000,00	Rp.281.708.693,00	92,37	Rp.488.974.713,00

3.1.2.b.1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

No.	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	6	7
1.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp.104.966.000,00	Rp.83.600.000,00	79,64	Rp.309.443.050,89

Belanja modal peralatan dan mesin T.A 2023 sebesar Rp.104.966.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.83.600.000,00 atau 79,64% dan pada tahun anggaran 2022 sebesar Rp.309.443.050,89 dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6
1.	Belanja Modal Alat Kantor	0,00	0,00	0,00	138.320.473,89
	Belanja Modal Alat Penyimpanan Peralatan Kantor	0,00	0,00	0,00	39.960.000,00
	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	0,00	0,00	0,00	98.360.473,89
2.	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	5.000.000,00	4.950.000,00	99,00	31.850.177,00
	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya(HomeUse)	5.000.000,00	4.950.000,00	99,00	31.850.177,00
3.	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	0,00	0,00	0,00	15.130.00,00
	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	0,00	0,00	0,00	13.500.000,00
	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	0,00	0,00	0,00	1.630.000,00
4.	Belanja Modal Komputer Unit	0,00	0,00	0,00	109.002.000,00
	Belanja Modal Personal Computer	0,00	0,00	0,00	109.002.000,00
5.	Belanja Modal Peralatan Komputer	99.966.000,00	78.650.000,00	78,68	21.316.000,00
	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	0,00	0,00	0,00	6.648.900,00
	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	0,00	0,00	0,00	8.491.500,00
	Belanja Modal Peralatan Mainframe	99.966.000,00	78.650.000,00	76,68	0,00
	Jumlah	104.966.000,00	83.600.000,00	79,64	309.443.050,89

Keterangan :

Pada Belanja Modal Peralatan Komputer di Belanja Modal Peralatan Mainframe berupa pengadaan printer KTP mempunyai selisih harga dari Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang ada di pagu SIPD lebih tinggi dari Harga Pasar yang sebenarnya.

3.1.2.b.2. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

No.	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	6	7
1.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp.200.000.000,00	Rp.198.108.693,00	99,05	Rp.179.531.662,11

Belanja modal gedung dan bangunan T.A 2023 sebesar Rp.200.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.198.108.693,00 atau 99,05% dan pada tahun anggaran 2022 sebesar Rp.179.531.662,11 dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian Belanja Modal	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4		
1.	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	200.000.000,00	198.108.693,00	99,05	179.531.662,11
	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	200.000.000,00	198.108.693,00	99,05	179.531.662,11
	Jumlah	200.000.000,00	198.108.693,00	99,05	179.531.662,11

3.2. LAPORAN OPERASIONAL (LO)

3.2.1 Pendapatan – LO

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Sulsel pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada TA. 2023 sebesar Rp.21.166.884,19 dan TA. 2022 sebesar Rp.12.840.000,00 yang terdiri dari :

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Penaikan / (Penurunan)	%
1	2	3	4	5	6
	Pendapatan – LO	21.166.884,19	12.840.000,00	8.326.884,19	64,85
1.	Retribusi Daerah – LO	12.840.000,00	12.840.000,00	0,00	0,00
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah – LO	12.840.000,00	12.840.000,00	0,00	0,00
2.	Lain-lain PAD Yang Sah – LO	8.326.884,19	0,00	8.326.884,19	0,00
	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Bendahara – LO	4.221.884,19	0,00	4.221.884,19	0,00
	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Biasa - LO	4.105.000,00	0,00	4.105.000,00	0,00
	Jumlah	21.166.884,19	12.840.000,00	8.326.884,19	64,85

3.2.2. Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam masa pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau ekonomi aset atau timbulnya kewajiban. Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan, nilai beban Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp.10.468.638.251,49 dan pada Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.12.052.386.348,98 yang terdiri dari :

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Penaikan / (Penurunan)	%
1	2	3	4	5	6
	Beban – LO	10.468.638.251,49	12.052.386.348,98	(1.583.748.097,49)	(13.14)
1.	Beban Operasi – LO	9.975.840.812,00	11.479.394.181,16	(1.503.553.369,16)	(13.10)
2.	Beban Penyusutan dan Amortisasi – LO	492.797.439,49	572.992.167,82	(80.194.728,33)	(14.00)
	Jumlah	10.468.638.251,49	12.052.386.348,98	(1.583.748.097,49)	(13.14)

3.2.2.a. Beban Operasi

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Penaikan / (Penurunan)	%
1	2	3	4	5	6
1.	Beban Operasi – LO	9.975.840.812,00	11.479.394.181,16	(1.503.553.369,16)	(13.10)

Saldo Beban Operasi Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2022 yang terdiri dari :

a. Beban Pegawai

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Penaikan / (Penurunan)	%
1	2	3	4	5	6
1.	Beban Pegawai – LO	7.576.266.593,00	7.114.386.302,00	461.880.291,00	6.49

Beban Pegawai pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Sulsel Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2022 yang terdiri atas :

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Penaikan / (Penurunan)	%
1	2	3	4	5	6
1	Beban Gaji Pokok PNS - LO	2.319.368.724,00	2.500.468.744,00	(181.100.020,00)	(7,24)
2	Beban Gaji Pokok PPPK - LO	115.652.600,00	66.087.200,00	49.565.400,00	75,00
3	Beban Tunjangan Keluarga PNS - LO	202.685.378,00	220.001.404,00	(17.316026,00)	(7,87)
4	Beban Tunjangan Keluarga PPPK - LO	11.002.852,00	6.287.344,00	4.715.508,00	75,00
5	Beban Tunjangan Jabatan PNS - LO	133.945.000,00	137.769.800,00	(3.824.800,00)	(2,78)
6	Beban Tunjangan Fungsional PNS - LO	47.934.000,00	59.269.960,00	(11.335.960,00)	(19,13)
7	Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS - LO	84.270.000,00	88.760.000,00	(4.490.000,00)	(5,06)
8	Beban Tunjangan Fungsional Umum PPPK - LO	7.360.000,00	4.360.000,00	3.000.000,00	68,81
9	Beban Tunjangan Beras PNS - LO	123.693.360,00	133.759.740,00	(10.066.380,00)	(7,53)
10	Beban Tunjangan Beras PPPK - LO	9.124.920,00	5.214.240,00	3.910.680,00	75,00
11	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS - LO	10.736.618,00	11.626.489,00	(889.971,00)	(7,65)
12	Beban Pembulatan Gaji PNS - LO	35.370,00	36.064,00	(694,00)	(1,92)
13	Beban Pembulatan Gaji PPPK - LO	3.108,00	1.796,00	1.312,00	73,05
14	Beban luran Jaminan Kesehatan PNS - LO	95.677.741,00	102.799.838,00	(7.122.097,00)	(6,93)

15	Beban luran Jaminan Kesehatan PPPK - LO	4.604.064,00	2.685.704,00	1.918.360,00	71,43
16	Beban luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS - LO	4.775.374,00	5.128.344,00	(352.970,00)	(6,88)
17	Beban luran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK - LO	237.912,00	138.782,00	99.130,00	71,43
18	Beban luran Jaminan Kematian PNS - LO	14.326.214,00	15.385.196,00	(1.058.982,00)	(6,88)
19	Beban luran Jaminan Kematian PPPK - LO	713.748,00	416.353,00	297.395,00	71,43
20	Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PNS - LO	3.016.175.251,00	3.754.189.304,00	(738.014.053,00)	(19,66)
21	Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja PNS - LO	940.139.180,00	0,00	940.139.180,00	0,00
22	Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja PNS - LO	433.535.179,00	0,00	433.535.179,00	0,00
Jumlah		7.576.266.593,00	7.114.386.302,00	461.610.291,00	6,49

b. Beban Barang dan Jasa

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Penaikan / (Penurunan)	%
1	2	3	4	5	6
1.	Beban Barang dan Jasa – LO	2.399.574.219,00	4.365.007.879,16	(1.965.433.660,16)	(45,03)

Beban Barang dan Jasa pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Sulsel Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2022 yang terdiri atas :

b.1. Beban Persediaan

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Penaikan / (Penurunan)	%
1	2	3	4	5	6
1.	Beban Persediaan – LO	610.541.020,00	1.852.364.147,00	(1.241.823.127,00)	(67,04)

Beban persediaan merupakan nilai beban persediaan periode TA. 2023 dan periode TA. 2022 yang terdiri dari :

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Penaikan / (Penurunan)	%
1	2	3	4	5	6
1.	Beban Bahan-bahan Bakar dan Pelumas	113.143.350,00	129.339.250,00	(16.195.900,00)	(12,52)
2.	Beban Alat Tulis Kantor	70.624.900,00	342.652.905,00	(272.028.005,00)	(79,39)
3.	Beban Kertas dan Cover	42.180.100,00	1.350.000,00	40.830.100,00	3024,45
4.	Beban Cetak	75.505.600,00	157.514.019,00	(82.008.419,00)	(52,06)
5.	Beban Pos	275.000,00	0,00	275.000,00	0,00
6.	Beban Bahan Komputer	19.427.570,00	55.966.725,00	(36.539.155,00)	(65,29)
7.	Beban Perabot Kantor	1.790.000,00	816.100,00	973.900,00	119,34
8.	Beban Alat Listrik	2.122.000,00	0,00	2.122.000,00	0,00
9.	Beban Suvenir/Cendera Mata	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00
10.	Beban Makanan dan Minuman Rapat	200.640.000,00	1.048.604.400,00	(847.964.400,00)	(80,87)
11.	Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	41.752.500,00	74.040.748,00	(32.288.248,00)	(43,61)
12.	Beban Pakaian Dinas Harian (PDH)	41.580.000,00	0,00	41.580.000,00	0,00
13.	Beban Pakaian KORPRI	0,00	42.080.000,00	(42.080.000,00)	(100,00)
JUMLAH		610.541.020,00	1.852.364.147,00	(1.241.823.127,00)	(67,04)

b.2. Beban Jasa

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Penaikan / (Penurunan)	%
1	2	3	4	5	6
1.	Beban Jasa – LO	755.800.016,00	845.377.654,00	(89.577.638,00)	(10,60)

Beban jasa merupakan nilai beban jasa periode TA. 2023 dan TA. 2022 yang terdiri dari :

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Penaikan / (Penurunan)	%
1	2	3	4	5	6
1.	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	20.950.000,00	139.700.000,00	(118.750.000,00)	(85,00)
2.	Beban Jasa Tenaga Administrasi	493.600.000,00	409.600.007,00	83.999.993,00	20,51
3.	Beban Jasa Tenaga Ahli	0,00	4.800.000,00	(4.800.000,00)	(100,00)
3.	Beban Jasa Tenaga Kebersihan	81.173.016,00	69.583.372,00	11.589.644,00	16,66
4.	Beban Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	0,00	49.900.000,00	(49.900.000,00)	(100,00)
4.	Beban Jasa Iklan/Reklame, Film dan Pemotretan	118.790.000,00	100.000.000,00	18.790.000,00	18,79
5.	Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00
6.	Beban Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan	10.192.000,00	10.428.275,00	(236.275,00)	(2,27)
7.	Beban Lembur	28.695.000,00	58.966.000,00	(30.271.000,00)	(51,34)
JUMLAH		755.800.016,00	845.377.654,00	(89.577.638,00)	(10,60)

b.3. Beban Iuran Jaminan

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Penaikan / (Penurunan)	%
1	2	3	4	5	6
1.	Beban Iuran Jaminan – LO	33.435.394,00	34.550.960,00	(1.115.566,00)	(3,23)

Beban Iuran Jaminan merupakan nilai beban iuran jaminan periode TA. 2023 dan TA. 2022 yang terdiri dari :

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Penaikan / (Penurunan)	%
1	2	3	4	5	6
1.	Beban Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Non ASN	30.940.594,00	32.164.160,00	(1.223.566,00)	(3,80)
2.	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Non ASN	1.108.800,00	1.060.800,00	48.000,00	4,52
3.	Beban Iuran Jaminan Kematian Bagi Non ASN	1.386.000,00	1.326.000,00	60.000,00	4,52
JUMLAH		33.435.394,00	34.550.960,00	(1.115.566,00)	(3,23)

b.4. Beban Pemeliharaan

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Penaikan / (Penurunan)	%
1	2	3	4	5	6
1.	Beban Pemeliharaan – LO	250.730.693,00	115.497.070,16	135.233.622,84	(117,09)

Beban Pemeliharaan merupakan nilai beban pemeliharaan periode TA. 2023 dan TA. 2022 yang terdiri dari :

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Penaikan / (Penurunan)	%
1	2	3	4	5	6
1.	Beban Pemeliharaan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	4.700.000,00	64.816.550,00	(60.116.550,00)	(92,75)
2.	Beban Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Penumpang	33.047.000,00	0,00	33.047.000,00	0,00
3.	Beban Pemeliharaan Alat Pembersih	2.775.000,00	0,00	2.775.000,00	0,00
4.	Beban Pemeliharaan Alat Pendingin	6.500.000,00	7.860.000,00	(1.360.000,00)	(17,30)
5.	Beban Pemeliharaan Personal Computer	5.600.000,00	6.000.000,00	(400.000,00)	(6,67)

6.	Beban Pemeliharaan Peralatan Komputer Lainnya	0,00	5.000.000,00	(5.000.000,00)	(100,00)
7.	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung Kantor	198.108.693,00	31.820.520,16	166.288.172,84	522,58
JUMLAH		250.730.693,00	115.497.070,16	(1.115.566,00)	117,09

b.5. Beban Perjalanan Dinas

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Penaikan / (Penurunan)	%
1	2	3	4	5	6
1.	Beban Perjalanan Dinas – LO	749.067.096,00	1.502.718.048,00	(753.650.952,00)	(50,15)

Beban Perjalanan Dinas merupakan nilai beban perjalanan dinas periode TA. 2023 dan TA. 2022 yang terdiri dari :

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Penaikan / (Penurunan)	%
1	2	3	4	5	6
1.	Beban Perjalanan Dinas Biasa	749.067.096,00	1.499.059.668,00	(749.992.572,00)	(50,03)
2.	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	0,00	3.658.380,00	(3.658.380,00)	(100,00)
JUMLAH		749.067.096,00	1.502.718.048,00	(753.650.952,00)	(50,15)

3.2.2.b. Beban Penyusutan dan Amortisasi

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Penaikan / (Penurunan)	%
1	2	3	4	5	6
1.	Beban Penyusutan dan Amortisasi – LO	492.797.439,49	678.607.555,88	(185.810.116,39)	(27,38)

Beban Penyusutan dan Amortisasi merupakan nilai beban penyusutan dan amortisasi periode TA. 2023 dan TA. 2022 yang terdiri dari :

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Penaikan / (Penurunan)	%
1	2	3	4	5	6
1.	Beban Penyusutan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	221.974.028,57	291.624.029,24	(69.650.000,67)	(23,888)
2.	Beban Penyusutan Mesin Ketik	97.178.993,99	91.237.865,42	5.941.128,57	6,51
3.	Beban Penyusutan Peralatan Studio Audio	5.000.000,00	6.250.000,00	(1.250.000,00)	(20,00)
4.	Beban Penyusutan Komputer Jaringan	122.078.651,31	143.388.705,49	(21.310.054,18)	(14,86)
5.	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Kantor	42.435.212,70	39.042.142,93	3.393.069,77	8,69
6.	Beban Penyusutan Tugu/Tanda Batas Administrasi	0,00	4.000.000,00	(4.000.000,00)	(100,00)
7.	Beban Penyusutan Instalasi Air Permukaan	2.601.479,59	2.851.479,58	(249.999,99)	(8,77)
8.	Beban Penyusutan Jaringan Pembawa	333.333,33	333.333,22	(0,11)	0,00
9.	Beban Penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga – Sewa	1.195.740,00	0,00	1.195.740,00	0,00
10.	Beban Amortisasi Lisensi dan Frenchise	0,00	99.880.000,00	(99.880.000,00)	(100,00)
JUMLAH		492.797.439,49	678.607.555,88	(185.810.116,39)	(27,38)

Dalam pos-pos laporan Keuangan terdapat selisih realisasi antara Laporan Realisasi Anggaran (LRA) periode TA. 2023 sebesar Rp.10.009.239.296,00 dengan Laporan Operasional (LO) periode TA. 2023 sebesar Rp.10.468.638.251,49 yang dijabarkan sebelumnya dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Nilai
LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)		Rp. 10.009.239.296,00
1	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PNS	(Rp. 203.271.239,00)

2	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja PNS	Rp.	135.489.098,00
3	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja PNS	Rp.	107.951.127,00
4	Alat Tulis Kantor	Rp.	20.304.150,00
5	Kertas dan Cover	(Rp.	3.784.300,00)
6	Bahan Komputer	(Rp.	1.215.400,00)
7	Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	(Rp.	5.271.920,00)
8	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	(Rp.	4.950.000,00)
9	Belanja Modal Peralatan Mainframe	(Rp.	78.650.000,00)
10	Beban Penyusutan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	Rp.	221.974.028,57
11	Beban Penyusutan Mesin Ketik	Rp.	97.178.993,99
12	Beban Penyusutan Peralatan Studio Audio	Rp.	5.000.000,00
13	Beban Penyusutan Komputer Jaringan	Rp.	122.078.651,31
14	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Kantor	Rp.	42.435.212,70
15	Beban Penyusutan Instalasi Air Bersih	Rp.	2.601.479,59
16	Beban Penyusutan Jaringan Pembawa	Rp.	333.333,33
17	Beban Penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga-Sewa	Rp.	1.195.740,00
LAPORAN OPERASIONAL (LO)		Rp.	10.468.638.251,49

Begitu juga dalam laporan Keuangan antara Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pada Belanja Operasi periode TA. 2023 sebesar Rp.9.925.639.296,00 dengan Laporan Operasional (LO) pada Beban Operasi periode TA. 2023 sebesar Rp.9.975.840.812,00 yang dijabarkan sebelumnya terdapat selisih realisasi dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Nilai
LRA BELANJA OPERASI		Rp. 9.925.639.296,00
1	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PNS	(Rp. 203.271.239,00)
2	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja PNS	Rp. 135.489.098,00
3	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja PNS	Rp. 107.951.127,00
4	Alat Tulis Kantor	Rp. 20.304.150,00
5	Kertas dan Cover	(Rp. 3.784.300,00)
6	Bahan Komputer	(Rp. 1.215.400,00)
7	Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	(Rp. 5.271.920,00)
LO BEBAN OPERASI		Rp. 9.975.840.812,00

3.3. NERACA

Neraca untuk pemerintah daerah dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan serta menggambarkan posisi keuangan suatu entitas akuntansi/entitas pelaporan mengenai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Dana pada tanggal tertentu.

3.3.1. Aset

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
1	2	3	4
	ASET	2.821.215.589,42	4.736.677.872,81
	Jumlah Aset	2.821.215.589,42	4.736.677.872,81

Aset adalah sumber-sumber daya bernilai ekonomi milik pribadi/perusahaan dan diharapkan bisa menghasilkan keuntungan di masa mendatang, pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Sulsel yang memiliki/mengelola aset pada tahun 2023 dan tahun 2022 terdapat penurunan nilai aset pada posisi aset lancar dan aset tetap dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
1	2	3	4
	ASET	2.821.215.589,42	4.736.677.872,81
1.	Aset Lancar	5.478.400,00	20.782.850,00
2.	Aset Tetap	2.621.393.729,42	4.616.015.022,81
3.	Aset Lainnya	194.343.460,00	99.880.000,00
	Jumlah Aset	2.821.215.589,42	4.736.677.872,81

Aset Lancar

Aset lancar adalah aset yang masa penggunaannya hanya dalam jangka waktu yang singkat. Masa pakai aset lancar yang umum adalah kurang dari satu tahun. Aset lancar umumnya terdiri dari kas, sekuritas, piutang, persediaan, pembayaran di muka, dan pendapatan. Laporan posisi keuangan atau neraca selalu menyajikan informasi tentang aset lancar dan komponen-komponennya dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
1	2	3	4
	ASET LANCAR	5.478.400,00	20.782.850,00
1.	Persediaan	5.478.400,00	20.782.850,00
	Persediaan Alat Tulis Kantor	478.700,00	7.711.350,00
	Persediaan Kertas dan Cover	3.784.300,00	0,00
	Persediaan Bahan Komputer	1.215.400,00	13.071.500,00
	Jumlah Aset	5.478.400,00	20.782.850,00

Ket :

- Berdasarkan hasil opname fisik barang-barang persediaan yang dilakukan pada tanggal 29 Desember 2023 dengan nomor : 021/2505/DISDUKCAPIL barang pakai habis dengan hasil sebagai berikut :

- Alat Tulis Kantor Rp.478.700,00
- Kertas dan Cover Rp.3.784.300,00
- Bahan Komputer Rp.1.215.400,00

Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap meliputi tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, aset tetap lainnya, dengan saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp.2.621.393.729,42 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp. 4.616.015.022,81 dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
1	2	3	4
	ASET TETAP	2.621.393.729,42	4.616.015.022,81
	Aset Tanah	0,00	950.000.000,00
	Aset Peralatan dan Mesin	4.167.926.150,89	4.546.926.150,89
	Aset Gedung dan Bangunan	2.655.273.941,95	3.233.375.303,84
	Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan	105.725.850,00	105.725.850,00
	Aset Akumulasi Penyusutan	(4.307.532.213,42)	(4.220.012.281,92)
	Jumlah Aset	2.621.393.729,42	4.616.015.022,81

Dengan rincian tersebut diatas, Aset Tetap dapat dirincikan dengan komponen sebagai berikut :

NO	NAMA/ JENIS BARANG	SALDO AWAL 1-Jan-23	BELANJA MODAL	MUTASI 1 JAN S/D 31 DES 2023		SALDO AKHIR 31-Des-23
				BERTAMBAH	BERKURANG	
1	TANAH	950.000.000,00	-	-	950.000.000,00	0,00
2	PERALATAN DAN MESIN	4.546.926.150,89	83.600.000,00	-	462.600.000,00	4.167.926.150,89
3	GEDUNG DAN BANGUNAN	3.233.375.303,84	198.108.693,00	-	776.210.054,89	2.655.273.941,95
4	JALAN IRIGASI JARINGAN	105.725.850,00	-	-	-	105.725.850,00
5	ASET TETAP LAINNYA	-	-	-	-	-
6	AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP	(4.220.012.281,92)	(491.601.699,49)	-	(404.081.767,99)	(4.307.532.213,42)
TOTAL		4.616.015.022,81	(209.893.006,49)	-	1.784.728.286,90	2.621.393.729,42

1. Tanah

Berdasarkan berita acara hasil rekonsiliasi aset tetap tahun 2023 tanggal 11 Januari 2024 bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Sulsel tidak lagi mengelola aset tanah dikarenakan pengalihan status penggunaan sebagai berikut :

NO	NAMA/ JENIS BARANG	SALDO AWAL 01-Jan-23	BELANJA MODAL	MUTASI 1 JAN S/D 31 DES 2023		SALDO AKHIR 31-Des-23
				BERTAMBAH	BERKURANG	
1	Tanah Bangunan Perumahan	950.000.000,00	-	-	950.000.000,00	-
TOTAL		950.000.000,00	-	-	950.000.000,00	-

Ket :

- Berkurang :

- Mutasi tanah berdasarkan BA pengalihan status penggunaan No.032/4854/BKAD tanggal 5 Mei 2023 dari Dinas Kependudukan & Capil ke Badan Keuangan & Aset Daerah berupa :
 - Tanah bangunan perumahan/Gedung tempat tinggal kode : 1.3.01.01.01.0001 (Tanah bangunan rumah negara gol. II) Rp.950.000.000,00

2. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin Merupakan nilai Aset Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 sebesar Rp.4.167.926.150,89 yang terdiri dari :

NO	NAMA/ JENIS BARANG	SALDO AWAL 01-Jan-23	BELANJA MODAL	MUTASI 1 JAN S/D 31 DES 2023		SALDO AKHIR 31-Des-23
				BERTAMBAH	BERKURANG	
1	Alat Angkutan	2.316.518.200,00	-	-	462.600.000,00	1.853.918.200,00
2	Alat Kantor dan Rumah Tangga	968.765.110,89	4.950.000,00	-	-	973.715.110,89
3	Alat Studio, Komunikasi dan Penerimaan	54.000.000,00	-	-	-	54.000.000,00
4	Komputer	1.207.642.840,00	78.650.000,00	-	-	1.286.292.840,00
TOTAL		4.546.926.150,89	83.600.000,00	-	462.600.000,00	4.167.926.150,89

Ket :

- Bertambah :

- Belanja modal semester 1 tahun 2023 (Utang modal tahun berjalan) berupa :
 - Belanja modal alat rumah tangga lainnya (Home Use) Kode : 1.2.02.05.02.0006 "Tangga Aluminium" Rp.4.950.000,00
- Belanja modal peralatan dan mesin tahun 2023 berupa :
 - Belanja modal peralatan Mainframe berdasarkan surat pesanan nomor : 027.1/176/XII/Disdukcapil/2023 tanggal 12 Desember 2023 dan Berita acara Pembayaran nomor : 010/BP/XII/2023 tanggal 14 Desember 2023 Kode : 5.2.02.10.02.0001 "Mesin perinter KTP" Rp.78.650.000,00

- Berkurang :

- Mutasi kendaraan berdasarkan BA pengalihan status penggunaan No.032/4854/BKAD tanggal 5 Mei 2023 dari Dinas Kependudukan & Capil ke Badan Keuangan & Aset Daerah berupa :
 - Kendaraan dinas bermotor perorangan – kode : 1.3.02.02.01.0001 Rp.462.600.000,00

3. Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan merupakan nilai bangunan per 31 Desember 2023 sebesar Rp.2.655.273.941,95 yang terdiri dari :

NO	NAMA/ JENIS BARANG	SALDO AWAL 01-Jan-23	BELANJA MODAL	MUTASI 1 JAN S/D 31 DES 2023		SALDO AKHIR 31-Des-23
				BERTAMBAH	BERKURANG	
1	Bangunan Gedung	3.033.375.303,84	198.108.693,00	-	576.210.054,89	2.655.273.941,95
2	Tugu Titik Kontrol/Pasti	200.000.000,00	-	-	200.000.000,00	-
TOTAL		3.233.375.303,84	198.108.693,00	-	776.210.054,89	2.655.273.941,95

Ket :

- Bertambah :

1. Belanja modal gedung dan bangunan tahun 2023 berupa :

- Belanja modal bangunan gedung kantor berdasarkan nota pesanan nomor : 027.1/92/VI/DISDUKCAPIL/2023 tanggal 13 Juni 2023 dan Berita acara Pembayaran nomor : 904/BP/VI/Disdukcapil tanggal 26 Juni 2023 Kode : 5.2.03.01.01.0001 "Perencanaan Pemeliharaan Atap Gedung" Rp.9.879.000,00
- Belanja modal bangunan gedung kantor berdasarkan nota pesanan nomor : 027.1/109/VII/DISDUKCAPIL/2023 tanggal 31 Juli 2023 dan Berita acara Pembayaran nomor : 808/BP/X/2023 tanggal 10 Oktober 2023 Kode : 5.2.03.01.01.0001 "Kontruksi Pemeliharaan Atap Gedung" Rp.180.737.193,00
- Belanja modal bangunan gedung kantor berdasarkan nota pesanan nomor : 027.1/110/VII/DISDUKCAPIL/2023 tanggal 31 Juli 2023 dan Berita acara Pembayaran nomor : 809/BP/X/2023 tanggal 10 Oktober 2023 Kode : 5.2.03.01.01.0001 "Pengawasan Pemeliharaan Atap Gedung" Rp.7.492.500,00

- Berkurang :

- Bangunan Gedung :

1. Mutasi rumah dinas berdasarkan BA pengalihan status penggunaan No.032/4854/BKAD tanggal 5 Mei 2023 dari Dinas Kependudukan & Capil ke Badan Keuangan & Aset Daerah berupa :

- Rumah Negara Golongan II Kode : 1.3.03.01.02.0002 (Tipe A Permanen) Rp.258.527.361,89

2. Reklasifikasi berdasarkan perjanjian sewa NO.974/020.1/DISDUKCAPIL Tgl. 02 Januari 2023 bangunan gudang Kode : 1.3.03.01.01.0002 ke Aset Lainnya (sewa) Kode : 1.5.02.01.01.0001 berupa :

- Bangunan gudang Kode : 1.3.03.01.01.0002 ke Aset Lainnya Kode : 1.5.02.01.01.0001 Rp.119.574.000,00

3. Reklasifikasi atas penyesuaian rekening belanja modal tahun 2023 dengan nomenklatur Aset tetap pembedagri 108 tahun 2016 sesuai berita acara verifikasi validasi No.032/06/I/BKAD tanggal 2 Januari 2023 bangunan gedung kantor kode : 1.3.03.01.01.0001 ke :

- Pemeliharaan gedung kantor Rp.198.108.693,00

- Tugu Titik Kontrol/Pasti :

1. Mutasi pagar berdasarkan BA pengalihan status penggunaan No.032/4854/BKAD tanggal 5 Mei 2023 dari Dinas Kependudukan & Capil ke Badan Pengelola Keuangan & Aset Daerah berupa :

- Pagar kode : 1.3.03.04.01.0004 (Pagar Permanen) Rp.200.000.000,00

4. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Jalan, Irigasi dan jaringan merupakan nilai instalasi dan jaringan per 31 Desember 2023 sebesar Rp.105.725.850,00 yang terdiri dari :

NO	NAMA/ JENIS BARANG	SALDO AWAL 01-Jan-22	BELANJA MODAL	MUTASI 1 JAN S/D 31 DES 2022		SALDO AKHIR 31-Des-22
				BERTAMBAH	BERKURANG	
1	Instalasi	95.725.850,00	-	-	-	95.725.850,00
2	Jaringan	10.000.000,00	-	-	-	10.000.000,00
TOTAL		105.725.850,00	-	-	-	105.725.850,00

Aset Lainnya

1. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp.194.343.460,00 terdiri dari :

NO	NAMA/ JENIS BARANG	SALDO AWAL 01-Jan-23	BELANJA MODAL	MUTASI 1 JAN S/D 31 DES 2023		SALDO AKHIR 31-Des-23
				BERTAMBAH	BERKURANG	
1	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	-	-	119.574.000,00	-	119.574.000,00
2	Aset Tidak Berwujud	99.880.000,00	-	-	-	99.880.000,00
2	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	-	(1.195.740,00)	(23.914.800,00)	-	(25.110.540,00)
TOTAL		99.880.000,00	(1.195.740,00)	95.659.200,00	-	194.343.460,00

Ket :

- Bertambah :

1. Reklasifikasi berdasarkan perjanjian sewa No.974/020.1/DISDUKCAPIL tgl. 02 Januari 2023 bangunan gudang kode : 1.3.03.01.01.0002 ke Aset Lainnya (sewa) kode : 1.5.02.01.01.0001 berupa :

- Bangunan Gudang Kode : 1.3.03.01.01.0002 ke Aset Lainnya kode : 1.5.02.01.01.0001 Rp.119.574.000,00

2. Reklasifikasi berdasarkan perjanjian sewa No.974/020.1/DISDUKCAPIL tgl. 02 Januari 2023 bangunan gudang kode : 1.3.03.01.01.0002 ke Aset Lainnya (sewa) kode : 1.5.02.01.01.0001 berupa :

- Nilai Selisih Akumulasi penyusutan bangunan gedung kode : 1.3.07.02.01.0001 (Rp.1.195.740,00)

3. Reklasifikasi berdasarkan perjanjian sewa No.974/020.1/DISDUKCAPIL tgl. 02 Januari 2023 bangunan gudang kode : 1.3.03.01.01.0002 ke Aset Lainnya (sewa) kode : 1.5.02.01.01.0001 berupa :

- Akumulasi penyusutan bangunan gedung kode : 1.3.07.02.01.0001 (Rp.23.914.800,00)

2. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan Aset Tetap sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp.4.307.532.213,42 terdiri dari :

NO	SKPD	SALDO AWAL 1 Januari 2023	PENYUSUTAN 1 JAN S/D 31 DES 2023			SALDO AKHIR 31 Desember 2023
			PENYUSUTAN 2023	BERTAMBAH	BERKURANG	
1	Peralatan dan Mesin	(3.210.037.273,91)	(446.231.673,87)	-	(302.892.857,14)	(3.353.376.090,64)
2	Gedung dan Bangunan	(977.173.919,68)	(42.435.212,70)	-	(101.188.910,85)	(918.420.221,53)
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	(32.801.088,33)	(2.934.812,92)	-	-	(35.735.901,25)
4	Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-	-
	Jumlah	(4.220.012.281,92)	(491.601.699,49)	-	(404.081.767,99)	(4.307.532.213,42)

Ket :

- Bertambah :

1. Beban penyusutan peralatan dan mesin berupa :

- Akumulasi penyusutan Aset Tetap – Kode : 1.3.07.01.02.0001 Akumulasi penyusutan alat angkutan (Rp.221.974.028,57)
- Akumulasi penyusutan Aset Tetap – Kode : 1.3.07.01.05.0001 Akumulasi penyusutan alat kantor & rumah tangga (Rp.97.178.993,99)
- Akumulasi penyusutan Aset Tetap – Kode : 1.3.07.01.06.0001 Akumulasi penyusutan alat studio, komunikasi & pemancar (Rp.5.000.000,00)
- Akumulasi penyusutan Aset Tetap – Kode : 1.3.07.01.10.0001 Akumulasi penyusutan komputer (Rp.122.078.651,31)

2. Beban penyusutan gedung dan bangunan berupa :

- Akumulasi penyusutan Aset Tetap – Kode : 1.3.07.02.01.0001 Akumulasi penyusutan bangunan gedung (Rp.42.435.212,70)

3. Beban penyusutan jalan, jaringan dan irigasi berupa :

- Akumulasi penyusutan Aset Tetap – Kode : 1.3.07.03.03.0001 Akumulasi penyusutan instalasi (Rp.2.601.479,59)
- Akumulasi penyusutan Aset Tetap – Kode : 1.3.07.03.04.0001 Akumulasi penyusutan jaringan (Rp.333.333,33)

- Berkurang :

1. Mutasi kendaraan berdasarkan BA pengalihan status penggunaan No.032/4854/BKAD tgl 5 Mei 2023 dari Dinas Kependudukan & Capil ke Badan Keuangan & Aset Daerah berupa :

- Akumulasi penyusutan alat angkutan Kode : 1.3.07.01.02.0001 (Rp.302.892.857,14)

2. Beban penyusutan gedung dan bangunan berupa :

- Mutasi rumah dinas berdasarkan BA pengalihan status penggunaan No.032/4854/BKAD tgl 5 Mei 2023 dari Dinas Kependudukan & Capil ke Badan Keuangan & Aset Daerah berupa Akumulasi penyusutan bangunan gedung Kode : 1.3.07.02.01.0001 (Rp.73.274.110,85)

- Mutasi pagar berdasarkan BA pengalihan status penggunaan No.032/4854/BKAD tgl 5 Mei 2023 dari Dinas Kependudukan & Capil ke Badan Keuangan & Aset Daerah berupa Akumulasi penyusutan tugu titik kontrol/pasti Kode : 1.3.07.02.04.0001 (Rp.4.000.000,00)

- Reklasifikasi berdasarkan perjanjian sewa No.974/020.1/DISDUKCAPIL tgl 2 Januari 2023 bangunan gudang Kode : 1.3.03.01.01.0002 ke Aset lainnya (Sewa) Kode : 1.5.02.01.0001 berupa Akumulasi penyusutan bangunan gedung kode : 1.3.07.02.01.0001 (Rp.23.914.800,00)

3.3.2. Kewajiban

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
1	2	3	4
	KEWAJIBAN	352.922.778,00	318.025.712,00
	Jumlah Kewajiban	352.922.778,00	318.025.712,00

a. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban jangka pendek merupakan Penilaian Utang dengan menggunakan nilai nominal yang harus dibayar pada tanggal jatuh tempo. Kewajiban jangka pendek dikategorikan dengan cara yang sama seperti aset lancar. Beberapa kewajiban jangka pendek, seperti utang kepada pegawai merupakan suatu bagian yang akan menyerap aset lancar dalam tahun pelaporan berikutnya. Kewajiban jangka pendek lainnya adalah kewajiban yang jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan atau kurang setelah tanggal pelaporan. Berikut adalah Kewajiban Jangka Pendek berupa Utang Beban Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) untuk bulan Desember tahun 2023 yang akan dibayarkan pada tahun 2024 sebesar Rp.352.922.778 berupa :

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
1.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PNS	109.482.553,00	318.025.712,00
2.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja PNS	135.489.098,00	0,00
3.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja PNS	107.951.127,00	0,00
	JUMLAH UTANG	352.922.778,00	318.025.712,00

b. Utang Jangka Pendek Lainnya

Pajak yang belum disetor di Kas Negara per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 0,00.

3.3.3. Ekuitas

Ekuitas Dana merupakan pos Neraca Pemerintah yang menumpang selisih antara asset dan kewajiban Pemerintah.

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
1	2	3	4
	Jumlah Kewajiban	352.922.778,00	318.025.712,00
	Ekuitas	2.468.292.811,42	4.418.652.160,81
	- Ekuitas	(6.028.819.206,49)	(7.695.520.719,08)
	- RK PPKD	8.497.112.017,91	12.114.172.879,89
	Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana	2.821.215.589,42	4.736.677.872,81

Ekuitas	Rp.	(6.028.819.206,49)
RK PPKD	Rp.	8.497.112.017,91
Jumlah Ekuitas	Rp.	2.468.292.811,42
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana	Rp.	2.821.215.589,42

3.4 LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus.defisit- LO, koreksi dan ekuitas akhir. Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023:

No	Uraian	Saldo 2023	Saldo 2022
1.	Ekuitas Awal	(7.695.520.719,08)	(8.691.915.319,88)
2.	Surplus/Defisit-LO	(10.447.471.367,30)	(12.039.546.348,98)
3.	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar :	12.114.172.879,89	13.035.940.949,78
	- Rekening Konsolidasi (RK)	12.114.172.879,89	12.994.146.036,45
	- Koreksi Penyusunan Aset Tetap	0,00	41.794.913,33
4.	Ekuitas Akhir	(6.028.819.206,49)	(7.695.520.719,08)

Rekening Koran PPKD

Rekening Koran PPKD adalah merupakan :

Saldo awal 1 januari 2023	Rp.	0,00
SP2D LS	Rp.	8.751.056.630,00
SP2D UP/GU/TU	Rp.	1.269.276.100,00
Penyetoran Sisa Kas	Rp.	(12.023.434,00)
JUMLAH RK PPKD	Rp.	10.008.309.296,00

BAB IV

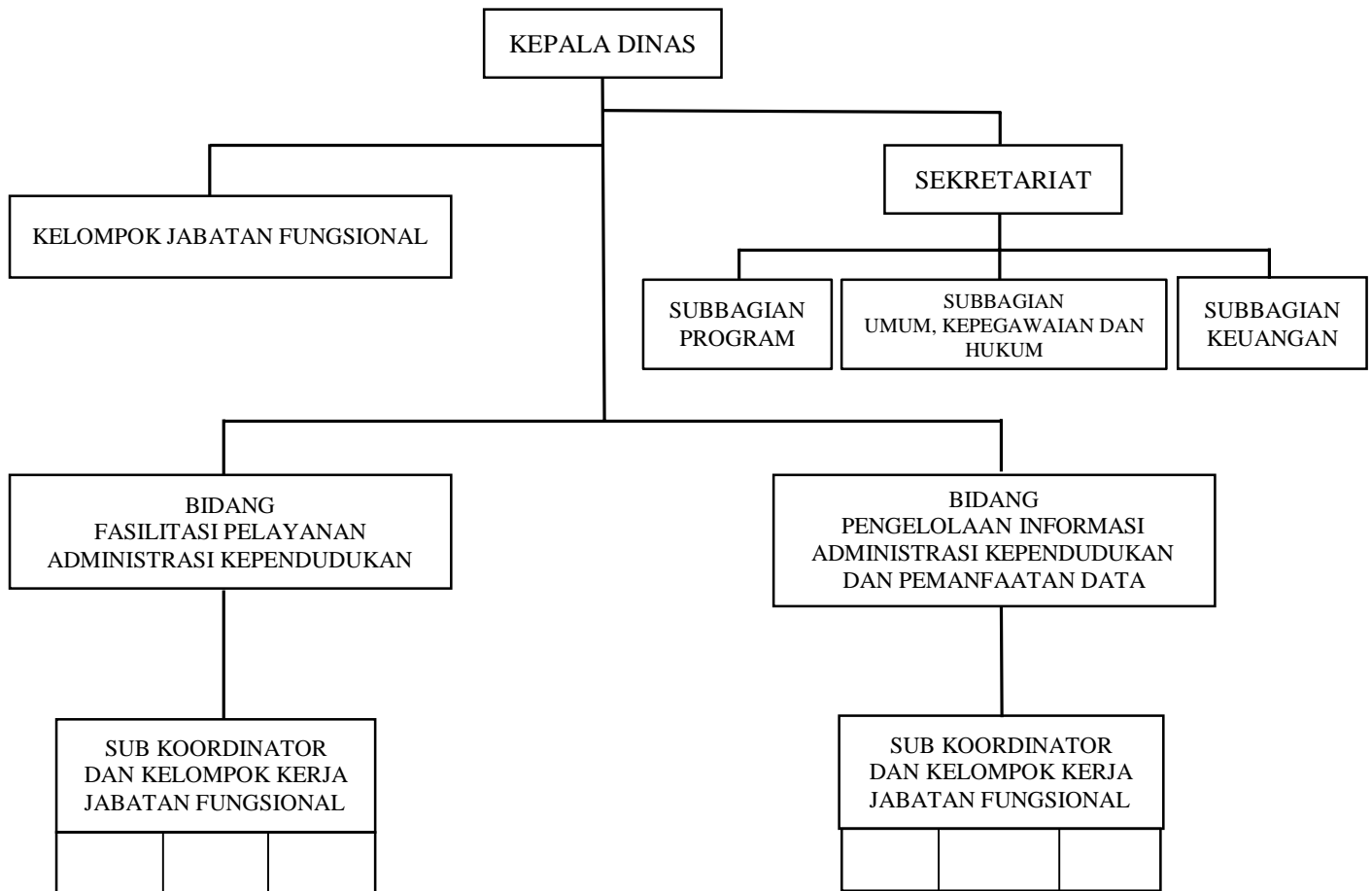
PENJELASAN ATAS INFORMASI – INFORMASI NON KEUANGAN SKPD

A. Struktur Organisasi OPD

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah. Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 50 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan, maka jabatan struktural terdiri dari 13 (Tiga Belas) jabatan, dengan rincian 1 (satu) Kepala Dinas, eselon IIA, 1 (satu) Sekretaris, eselon IIIA, 2 (dua) Kepala Bidang, eselon IIIA, dan 3 (tiga) Kepala Sub Bagian eselon IVA, 6 (enam) Sub koordinator, maka dapat disampaikan susunan organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Sulsel Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, meliputi:
 - a. Sub Bagian Program;
 - b. Sub Bagian Umum, Kepegawaian, Dan Hukum;
 - c. Sub Bagian Keuangan.
3. Bidang Fasilitasi Pelayanan Administrasi Kependudukan, meliputi:
 - a. Analis Kebijakan Ahli Muda/Sub Kordinator Bina Aparatur Pendaftaran Penduduk;
 - b. Analis Kebijakan Ahli Muda/Sub Kordinator Bina Aparatur Pencatatan Sipil;
 - c. Analis Kebijakan Ahli Muda/Sub Kordinator Monitoring, Evaluasi Dan Dokumentasi.
4. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data, meliputi:
 - a. Analis Kebijakan Ahli Muda/Sub Kordinator Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan;
 - b. Analis Kebijakan Ahli Muda/Sub Kordinator Kerja Sama, Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan;
 - c. Analis Kebijakan Ahli Muda/Sub Kordinator Monitoring dan Evaluasi.
5. Jabatan Fungsional.

Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Sulsel



Sumber : Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 50 Tahun 2021 tentang Kedudukan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan

B. Tugas dan Fungsi OPD

a. Tugas

Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 50 Tahun 2021 tentang Kedudukan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas ini menyatakan bahwa kedudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan pembantu Gubernur dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kependudukan dan pencatatan sipil yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah. Dalam hubungan tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas pokok sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur menyelenggarakan urusan pemerintah bidang kependudukan dan pencatatan sipil menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Kepala Dinas mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;

- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan, dan pencatatan sipil;
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas dan;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan kegiatan, memberikan pelayanan teknis dan administrasi penyusunan program, pelaporan, umum, kepegawaian, hukum dan keuangan dalam lingkungan Dinas. Fungsi Sekretaris adalah ;

- a. Pengoordinasian pelaksanaan tugas dalam lingkup dinas;
- b. Pengoordinasian penyusunan program dan pelaporan;
- c. Pengoordinasian urusan umum, kepegawaian, dan hukum;
- d. Pengoordinasian pengelolaan administrasi keuangan; dan
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

Susunan organisasi di Sekretariat terdiri atas :

- Subbagian Umum, Kepegawaian, Dan Hukum dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam mengumpulkan bahan dan melakukan urusan ketatausahaan, administrasi pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang, urusan rumah tangga serta mengelola administrasi kepegawaian dan hukum.
- Subbagian Program dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam mengumpulkan bahan dan melakukan penyusunan program, penyajian data dan informasi, serta penyusunan laporan.
- Subbagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam mengumpulkan bahan dan melakukan pengelolaan administrasi dan pelaporan keuangan.

3. Bidang Fasilitas Pelayanan Administrasi Kependudukan

Bidang Fasilitas Pelayanan Administrasi Kependudukan dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan, merumuskan, dan melaksanakan kebijakan teknis fasilitas pelayanan administrasi kependudukan dan Pencatatan Sipil. Fungsi bidang ini adalah :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang fasilitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang fasilitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang fasilitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- d. Pelaksanaan administrasi bidang fasilitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dan;
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

Susunan organisasi di Bidang Fasilitas Pelayanan Administrasi Kependudukan terdiri atas :

- Seksi Bina Aparatur Pendaftaran Penduduk dipimpin oleh Sub Koordinator yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Fasilitas Pelayanan Administrasi Kependudukan dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bina aparatur pendaftaran penduduk.
- Seksi Bina Aparatur Pencatatan Sipil dipimpin oleh Sub Koordinator yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Fasilitas Pelayanan Administrasi Kependudukan dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis fasilitas bina aparatur pencatatan sipil.
- Seksi Monitoring, Evaluasi, Dan Dokumentasi Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil dipimpin oleh Sub Koordinator yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Fasilitas Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis monitoring, evaluasi, dan dokumentasi administrasi kependudukan.

4. **Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data**

Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Dan Pemanfaatan Data dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan, merumuskan, dan melaksanakan kebijakan teknis pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data. Fungsi bidang ini diantaranya :

- a. Perumusan kebijakan teknis Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Dan Pemanfaatan Data;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Dan Pemanfaatan Data;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Dan Pemanfaatan Data;
- d. Pelaksanaan administrasi Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Dan Pemanfaatan Data; dan
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

Susunan organisasi di Bidang Kelembagaan dan Informasi Administrasi Kependudukan terdiri atas :

- Seksi Pengolahan Dan Penyajian Data Kependudukan dipimpin oleh Sub Koordinator yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Dan Pemanfaatan Data dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis pengolahan dan penyajian data kependudukan.
- Seksi Kerja Sama, Pemanfaatan Data Dan Inovasi Pelayanan dipimpin oleh Sub Koordinator yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Dan Pemanfaatan Data dalam melakukan

penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis kerja sama, pemanfaatan data dan inovasi pelayanan.

- Seksi Monitoring Dan Evaluasi dipimpin oleh Sub Koordinator yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Dan Pemanfaatan Data dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis monitoring dan evaluasi administrasi kependuduka.

b. Fungsi

Untuk menyelenggarakan Tugas Pokok tersebut diatas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan catatan sipil;
2. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan catatan sipil;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan catatan sipil;
4. Pelaksanaan administrasi dinas;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait tugas dan fungsinya.

C. Sumber Daya OPD

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan didukung dengan sumber daya manusia yang berstatus PNS, PPPK dan Non ASN yang menurut data Desember Tahun 2023 terdiri dari 46 (empat puluh enam) orang yang berstatus PNS dan 3 (tiga) orang berstatus PPPK serta 19 (sembilan belas) orang berstatus Non ASN. Berikut adalah data pegawai berdasarkan golongan PNS dan PPPK yang terdiri dari :

Jumlah Pegawai Menurut Peta Jabatan 2023 Dinas Dukcapil Provinsi Sulawesi Selatan

No	Unit Kerja	Jumlah
1	Eselon II	1
2	Eselon III	2
3	Eselon IV	3
4	Fungsional Tertentu (Ahli dan Trampil)	7
5	Fungsional Pelaksana (Staf)	36
Total		49

Sumber : DaftarUrut Kepangkatan Tahun 2023

Pada tabel diatas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memiliki pejabat Eselon II sebanyak 1 orang, Eselon III sebanyak 2 orang, Eselon IV sebanyak 3 orang, Fungsional Tertentu (Ahli dan Terampil) sebanyak 7 orang dan Fungsional Pelaksana (staf) sebanyak 36 orang.

Jumlah Pegawai Menurut Golongan Jabatan Tahun 2023 Dinas Dukcapil Provinsi Sulawesi Selatan

No	Unit Wilayah	Golongan				Jumlah
		I	II	III	IV	
1	Kepala Dinas	-	-	-	1	1
2	Sekretaris	-	-	-	1	1
3	Kasubag Umum, Kepegawaian dan Hukum	-	-	-	1	1
4	Kasubag Program	-	-	1	-	1
5	Kasubag Keuangan	-	-	-	1	1
6	Kepala Bidang Fasilitas Pelayanan Administrasi Kependudukan	-	-	-	1	1
7	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	-	-	-	-	-
8	Jabatan Fungsional Tertentu (Ahli dan Terampil)	-	-	2	5	7
9	Fungsional Pelaksana (Staf)	-	5	30	1	36
Total		-	5	33	11	49

Sumber : DaftarUrut Kepangkatan Tahun 2023

Berdasarkan tabel diatas pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan didominasi oleh Pegawai Golongan III sebanyak 33 orang (67,34%) dari total 49 orang pegawai yang ada di Dinas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan.

D. Visi dan Misi

a. Visi

“Terwujudnya Masyarakat Sulawesi Selatan Yang Terintegrasi, Seimbang dan Sejahtera”.

b. Misi

1. Mewujudkan pengelolaan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang prima dan akuntabel;
2. Mengembangkan kapasitas sumber daya pelayanan publik yang meliputi Sumber Daya Manusia, teknologi informasi administrasi kependudukan dan pencatatan sipil serta sarana pendukung lainnya.

E. Program dan Kegiatan OPD

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan mempunyai 5 Program, 16 Kegiatan dan 42 Sub Kegiatan selama Tahun Anggaran 2023 yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi:

1.1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1.1.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

1.1.2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

1.1.3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD

1.1.4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD

1.1.5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD

1.1.6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

1.1.7. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1.2.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

1.2.2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

- 1.2.3. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
- 1.2.4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD
- 1.2.5. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
- 1.3. Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah
 - 1.3.1. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
 - 1.3.2. Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD
- 1.4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 1.4.1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
- 1.5. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1.5.1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 1.5.2. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - 1.5.3. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 1.5.4. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
 - 1.5.5. Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - 1.5.6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - 1.5.7. Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD
- 1.6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1.6.1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 1.6.2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 1.7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1.7.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 1.7.2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 1.7.3. Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
 - 1.7.4. Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- 2. Program Pendaftaran Penduduk:
 - 2.1. Pelayanan Pendaftaran Kependudukan
 - 2.1.1. Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk Skala Provinsi
 - 2.1.2. Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk
 - 2.2. Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan
 - 2.2.1. Fasilitasi Terkait Pendaftaran Penduduk
 - 2.3. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan
 - 2.3.1. Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk
- 3. Program Pencatatan Sipil:
 - 3.1. Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi
 - 3.1.1. Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil
 - 3.1.2. Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil
 - 3.1.3. Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil

- 3.2. Pemberiaan Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil
 - 3.2.1. Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pencatatan Sipil
- 4. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan:
 - 4.1. Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
 - 4.1.1. Penyusunan Tata Cara Pengelolaan Data Kependudukan Yang Bersifat Data Perseorangan, Data Agregat dan Data Pribadi di Provinsi dan Kabupaten/Kota
 - 4.2. Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi
 - 4.2.1. Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
 - 4.2.2. Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan
 - 4.3. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi
 - 4.3.1. Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
 - 4.3.2. Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan
- 5. Program Pengelolaan Profil Kependudukan:
 - 5.1. Penyediaan Profil Kependudukan
 - 5.1.1. Penyediaan Data Kependudukan Provinsi

BAB V PENUTUP

Laporan pertanggungjawaban Keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2023.

Laporan Realisasi Anggaran :

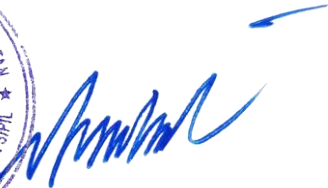
- Realisasi Belanja Daerah	Rp. 10.008.309.296,00
Belanja Operasi	Rp. 9.726.600.603,00
Belanja Modal	Rp. 281.708.693,00

Demikian Laporan Keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2023 ini disusun dalam rangka memenuhi kewajiban pertanggungjawaban Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Sulsel selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dan Jasa.

Makassar, 02 Januari 2024

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Provinsi Sulawesi Selatan




Dr. M. Iqbal S. Suhaeb, S.E., M.T.
NIP. 19660902 198810 1 001
Pangkat: Pembina Utama Madya